

ABSTRAKSI

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis untuk melihat posisi Indonesia dalam percaturan globalisasi. Dimana dalam globalisasi, setiap negara akan melakukan hubungan perdagangan bebas untuk menciptakan perkonomian dunia yang dinamis. Terlebih untuk Indonesia, Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional seperti Pasar Bebas 2020, *Asean Community* 2015, dan juga Integrasi logistik ASEAN tahun 2013, hal ini tentunya perlu dipersiapkan untuk menambah daya saing Indonesia dalam Pasar Bebas.

Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia harus dipandang sebagai nilai lebih untuk membangun dan mempersiapkan perekonomian Indonesia. Namun tanpa ada pengelolaan dan juga manajemen yang baik dari pemerintah, maka hal tersebut tidak mungkin terlaksana. Adanya UU PM No. 25 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mengembalikan iklim investasi nyatanya juga masih berbenturan dengan berbagai permasalahan perundangan yang ada.

Menyikapi semua kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan MP3EI sebagai stimulus jangka panjang dalam usaha percepatan dan pembangunan Indonesia. dokumen kerja ini dijadikan dokumen komplementer dalam usaha menarik investor. Dokumen kerja inilah yang dijadikan cetak biru dalam membangun perekonomian Indonesia. Dengan demikian MP3EI dapat dijadikan acuan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan diharapkan iklim investasi di Indonesia dapat membaik. Kebijakan ini diharapkan menjadi nilai lebih tersendiri bagi Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan iklim investasi Indonesia dan juga menyederhanakan segala bentuk perizinan investasi di Indonesia. MP3EI juga menawarkan sejumlah kemudahan dalam proses perijinan memulai usaha di

Indonesia. Permasalahan yang dianggap selalu mempersulit arus FDI di Indonesia. Selain itu, MP3EI juga telah mengatur pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. karena itu, sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi, dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

ABSTRACT

This study begins with the author to see the interest in the position in the constellation of globalization Indonesia. Where in globalization, each country will conduct free trade relations to create a dynamic world economy. Especially for Indonesia, Indonesia has ratified international agreements such as the Free Market 2020, the ASEAN Community by 2015, ASEAN logistics integration and also in 2013, it certainly needs to be prepared to increase Indonesia's competitiveness in the Free Market.

Availability of Natural Resources and Human Resources should be seen as more value to build and prepare for the Indonesian economy. Yet without management and good management of the government, then it is impossible. The Investment Law No. 25 of 2007 which aims to restore the investment climate in fact is still in conflict with the various problems of existing legislation.

In response to all these conditions, the Indonesian government issued MP3EI as a long-term stimulus efforts and accelerating the development of Indonesia. This working document used as a complementary document in an effort to attract investors. This is a working document which is used as a blueprint to build the economy of Indonesia. This can be used as a reference MP3EI investors to invest in Indonesia. And the investment climate in Indonesia is expected to be improved. This policy is expected to be more distinct values for Indonesia.

It is meant for restore Indonesia's investment climate and also simplify all forms of licensing investment in Indonesia. MP3EI also offers a number of convenience in the licensing process of starting a business in Indonesia. The problem is considered always complicate FDI in Indonesia. In addition, MP3EI also organized some fiscal and non-fiscal. Therefore, as a working document, containing MP3EI

development direction of the main economic activities are more specific, complete with infrastructure needs and recommendations of changes / revisions to the regulations that need to be done and the enactment of new laws and regulations are needed to drive the acceleration and expansion of investment , and integral part of national development planning system.